

STRATEGI ALIANSI *QUADRILATERAL SECURITY DIALOGUE* (QUAD) DALAM MENANGGAPI ESKALASI KONFLIK LAUT CHINA SELATAN (TAHUN 2020-2024)

Oleh : Meylani Cesarah Milda
Pembimbing : Dr. Mohammad Saeri, M.Hum

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis bagaimana tanggapan atau respon yang diberikan oleh aliansi Quad atau *Quadrilateral Security Dialogue* (Quad) terhadap ketegangan eskalasi konflik di Laut China Selatan yang merupakan kawasan vital yang terletak di kawasan yang lebih luas bernama Indo-Pasifik yang juga memiliki nilai strategis tinggi salah satunya ialah keberagaman sumber daya alamnya. Fokus penelitian ini terletak pada upaya *Quadrilateral Security Dialogue* sebagai kelompok negara yang berbasis di Indo-Pasifik yang memberikan inisiatif strategi dalam menanggapi eskalasi konflik di Laut China Selatan yang notabene merupakan salah satu kawasan strategis bagi dunia internasional.

Penulisan skripsi ini akan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yang bersumber dari buku, dokumen, laporan, jurnal, surat kabar, artikel, dan internet. Penelitian ini menggunakan perspektif Neorealisme dan teori Keamanan Maritim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Quad telah mengeluarkan dan melaksanakan beberapa inisiatif strategi dalam merespon atau menanggapi kemungkinan potensi ancaman dan eskalasi konflik di kawasan Laut China Selatan sebagai kawasan vital di Indo-Pasifik demi menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Strategi tersebut mencakup latihan bersama Malabar, kerja sama patroli pantai, dan pengawasan terhadap Laut China Selatan dengan menggunakan satelit atau radar. Namun, perlu ditekankan bahwa strategi Quad ini bersifat memberikan bantuan tanpa berusaha untuk mendominasi dan menggeser diskursus keamanan maritime di Laut China Selatan ataupun melangkahi sentralitas ASEAN.

Kata Kunci: Keamanan Maritim, Eskalasi Konflik, Laut China Selatan, Strategi, *Quadrilateral Security Dialogue*

ABSTRACT

This research analyzes the response of the Quadrilateral Security Dialogue (Quad) alliance to the escalating tensions and conflict in the South China Sea—an area of strategic importance within the broader Indo-Pacific region, which holds significant value due to its diverse natural resources. The focus of this study is on the strategic initiatives taken by the Quad, a group of Indo-Pacific-based countries, in addressing the conflict escalation in the South China Sea, a region considered vital for international security and stability.

This research employs a qualitative method through literature review, sourcing data from books, documents, reports, journals, newspapers, articles, and online publications. The study adopts the perspective of Neorealism and the theory of Maritime Security.

The study finds that the Quad has implemented various strategic initiatives to respond to potential threats and escalating conflict in the South China Sea, aimed at preserving regional stability and security. These initiatives include joint Malabar exercises, cooperation in coast guard patrols, and maritime surveillance through satellite and radar technologies. However, it is important to emphasize that the Quad's approach is supportive rather than dominant, respecting ASEAN's centrality in the regional maritime security discourse.

Keywords: Maritime Security, Conflict Escalation, South China Sea, Strategy, Quadrilateral Security Dialogue

PENDAHULUAN

Konflik dan ketegangan dalam konteks hubungan internasional merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan akan selalu terjadi. Salah satu konflik yang kerap kali terjadi ialah permasalahan mengenai wilayah kelautan yang tidak akan jauh permasalahannya dari persoalan kedaulatan sebuah negara. Salah satu wilayah yang memiliki ketegangan tiada habisnya ialah konflik ketegangan pada kawasan Laut China Selatan.

Permasalahan ini bermula dari tindakan China yang menerbitkan sebuah peta pada tahun 1947 dengan tertera garis putus-putus yang dahulu dikenal dengan sebutan “*eleven-dash-line*” kemudian berganti menjadi “*nine-dash-line*” pada tahun 1952 dengan menghapuskan dua garis putus-putus pada Teluk Tonkin dan Pulau Bach Long Vi sebagai bentuk hubungan baik dengan Vietnam.¹ Peta tersebut menggambarkan klaim China terhadap Laut China Selatan yang mencakup 90% dari wilayah Laut China Selatan yang digambarkan dengan garis putus-putus. Upaya klaim ini tentunya tidak sesuai dengan *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982 pasal 57 yang menyatakan bahwa ZEE suatu negara tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis

pangkal.² Ditambah pula dengan fakta bahwa China merupakan negara yang sudah menandatangani dan meratifikasi UNCLOS 1982 sehingga hal ini menimbulkan protes keras akibat ketidakpatuhan China dengan UNCLOS 1982 yang notabene sudah disetujui oleh China untuk diterapkan.

Pada tahun 2009 China kembali menyita perhatian publik dengan mengajukan secara resmi nota diplomatik kepada PBB dengan mencantumkan peta *nine-dash-line*. Tindakan tersebut menimbulkan respon penolakan keras dari negara-negara kawasan seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia dengan kembali mengajukan protes melalui nota diplomatik ke PBB.³

Gambar 1 Peta *nine-dash-line*



Sumber: USNI (U.S Naval Institute) News

¹ Hannah Beech, “Just Where Exactly Did China Get the South China Sea Nine-Dash Line From?”, TIME, diakses pada 3 November 2024, <https://time.com/4412191/nine-dash-line-9-south-china-sea/>

² Pasal 57 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

³ Tide Aji Pratama et al, “Diplomasi Parlemen di Tengah Gejolak Dunia: Peran BKSAP DPR RI di Kancan Parlemen Dunia”, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI), Hal. 54

Tindakan represif China kembali berlanjut pada tahun 2011 ketika terdapat dua kapal patroli China yang mengganggu kapal survey milik Departemen Energi Filipina (DOE) yang sedang melakukan eksplorasi gas alam di Reed Bank.⁴ China juga berupaya untuk memiliterisasi kawasan Laut China Selatan dengan menempatkan angkatan militer serta persenjataan dan peralatan canggih milik China yang tersebut di Kepulauan Sparty, Kepulauan Paracel, bahkan kini hingga Laut Natuna Utara.

Permasalahan pada kawasan Laut China Selatan ini sebenarnya tidak hanya berputar pada China saja, namun negara kawasan lainnya pun melakukan beberapa tindakan ilegal lainnya seperti penangkapan ikan ilegal seperti yang pernah dilakukan oleh nelayan Vietnam di Laut Natuna Utara. Terdapat beberapa faktor pendorong Laut China Selatan kerap kali mengalami ketegangan, yaitu:

1. Klaim kedaulatan Laut China Selatan yang dilakukan oleh China yang dapat dikatakan sebagai faktor utama timbulnya ketegangan pada kawasan perairan ini.
2. Strategisnya wilayah Laut China Selatan yang tidak hanya vital bagi jalur perdagangan dunia, namun juga memiliki pesona kekayaan bawah laut yang berlimpa seperti cadangan minyak, gas alam, hingga flora dan fauna yang akan menguntungkan bagi negara apabila mampu mengontrol wilayah perairan ini.⁵

3. China yang berusaha mendominasi kawasan Laut China Selatan dengan upaya klaim yang dilakukannya. Klaim tersebut bukan hanya omongan belaka, pasalnya China telah membangun pulau reklamasi sejak tahun 2013 di Kepulauan Sparty seperti Mischief Reef, Gaven Reef, Hughes Reef, Fiery Cross, Johnson South, dan sebagainya.⁶ China juga telah memiliterisasi pulau tersebut dengan meletakkan fasilitas militer seperti landasan udara, sistem radar, hingga persenjataan militer canggih lainnya.⁷

Akibat dari banyaknya permasalahan serius yang tidak sesuai dengan peraturan UNCLOS 1982 terjadi di Laut China Selatan menimbulkan kekhawatiran akan semakin meluasnya ketegangan di Laut China Selatan. Hal ini kemudian mendorong beberapa negara untuk memperkuat aliansi atau kerjasama dengan negara lain. Salah satunya ialah aliansi *Quadrilateral Security Dialogue* atau yang saat ini kerap kali disebut dengan istilah aliansi Quad. Aliansi yang berbasis di Indo-Pasifik dengan salah satu tujuan utamanya ialah menjaga kebebasan dan kestabilan kawasan Indo-Pasifik dan Laut China Selatan merupakan jantung dari Indo-Pasifik sehingga Quad merasa perlu memberikan respon terkait permasalahan yang terjadi di Laut China Selatan demi mencapai tujuan utama terbentuknya aliansi Quad tersebut.

⁴ Renato Cruz De Castro, *The Limits of Intergovernmentalism: The Philippines' Changing Strategy in the South China Sea Dispute and Its Impact on the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(3), 2020

⁵ Auliah Ambarwati et al, *Pesona Kekayaan Alam: Sumber Konflik di Kawasan Laut China Selatan*, *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 2023

⁶ Try Satria Indrawan Putra dkk, *Reklamasi Pulau Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan: Suatu Analisis terhadap Status Penambahan Wilayah dan Dampak terhadap Jalur Pelayaran Internasional*, *Diponegoro Law Review*, 5(2), 2016

⁷ Poltak Partogi Nainggolan, *Militerisasi Laut China Selatan*, *Jurnal Info Singkat*, 10(11), 2018

KERANGKA TEORI

Teori: Keamanan Maritim

Keamanan maritim merupakan istilah yang muncul sebagai akibat dari adanya rasa ketidakamanan atau sebuah ancaman pada kawasan maritim seperti sengketa antarnegara di kawasan perairan, terorisme maritim, pembajakan, hingga tindakan ilegal lainnya. Namun, banyak peneliti yang menyatakan bahwa cukup sulit untuk memaknai arti dari istilah keamanan maritim karena maknanya akan berubah tergantung aktor dan kepentingannya, waktu, dan tempat.

Pada buku Christian Bueger dan Timothy Edmunds yang berjudul “*Understanding Maritime Security*” berhasil mengungkapkan empat *framework* yang dapat memahami keamanan maritim dan menangani isu keamanan maritim yaitu kerangka hukum, kerangka berbasis negara dan lembaga, kerangka praktik, dan kerangka penyebab.⁸ Dalam penulisan artikel ini, penulis lebih terfokus pada kerangka praktik yaitu kerangka yang akan memungkinkan menganalisis bagaimana aktor-aktor akan memberikan respon atau tindakan terkait isu keamanan pada sebuah wilayah perairan yang mengalami permasalahan. Penulis juga akan menggunakan kerangka berbasis negara dan institusi yang akan berguna dalam menganalisis peran kerja sama Quad dalam menjaga keamanan maritim Laut China Selatan dari potensi-potensi ancaman yang dapat menyebabkan perluasan konflik pada Laut China Selatan.

Level Analisis: Kelompok Negara

Penelitian ini menggunakan level analisis kelompok negara yaitu menganalisis

interaksi antar kelompok negara yaitu seperti aliansi, forum, ataupun organisasi regional. Analisis ini mencakup bagaimana kelompok negara tersebut akan bekerjasama dalam upaya menyelesaikan permasalahan ataupun bersaing dalam konteks regional maupun global.⁹

Penulisan penelitian ini berfokus pada sebuah kelompok negara yang saling bekerjasama dalam upaya merespon sebuah permasalahan yang dianggap urgensi terjadi pada kawasan Laut China Selatan yang merupakan kawasan perairan di Indo-Pasifik dan memiliki nilai strategis bagi dunia internasional. *Quadrilateral Security Dialogue* atau yang kini disebut Quad sebagai kelompok negara yang berbasis di Indo-Pasifik memutuskan untuk mengeluarkan inisiatif dalam bentuk strategi sebagai bentuk respon dalam menanggapi kekhawatiran akan ancaman perluasan konflik di Laut China Selatan. Tindakan Quad dalam mengeluarkan inisiatif strategi ini sejalan juga dengan tujuan utama terbentuknya Quad yaitu mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, inklusif, berlandaskan nilai demokrasi, dan bebas dari segala paksaan ataupun intimidasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif deskriptif yaitu dengan menggambarkan sebuah fenomena sesuai dengan data ataupun keadaan sesuai dengan yang terjadi pada lapangan. Dalam penelitian ini terfokus pada penggambaran fenomena mengenai aliansi Quad dengan menganalisis strategi yang dicanangkan oleh aliansi Quad dalam menanggapi atau merespon konflik di Laut China Selatan yang dikhawatirkan semakin meluas.

⁸ Christian Bueger dan Timothy Edmunds, *Understanding Maritime Security*, (New York: Oxford University Press, 2024), hal 30-58

⁹ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari buku, dokumen, laporan, jurnal, surat kabar, artikel, dan internet yang relevan dan menyajikan informasi mengenai *Quadrilateral Security Dialogue* yang sah atau terverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Aliansi Quad

Aliansi *Quadrilateral Security Dialogue* merupakan sebuah kelompok aliansi informal yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, India, Australia. Quad pada awalnya terbentuk pertama kali pada tahun 2004 dengan nama "*Tsunami Core Group*" yaitu sebuah organisasi negara sementara yang terbentuk sebagai bentuk respon dalam menanggapi bencana tsunami pada tahun 2004 yang juga dikenal dengan sebutan "*boxing day*". Keempat negara tersebut bekerjasama menyumbangkan lebih dari 40.000 tentara dan relawan kemanusiaan yang juga diikuti dengan bantuan helikopter, kapal kargo, dan pesawat angkut ke negara yang berdampak yaitu Indonesia, Thailand, Sri Lanka, Malaysia, India, Maladewa, dan Mauritius terutama Aceh sebagai wilayah yang paling berdampak.

Pasca tragedi tsunami, kelompok *Tsunami Core Group* dibubarkan pada pertengahan Januari 2005. Kelompok negara ini kemudian memunculkan kerangka ide pembentukan sebuah kemitraan strategis jangka panjang empat negara yang diprakarsai oleh Shinzo Abe yang saat itu tengah menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang. Tahun 2007 merupakan awal diselenggarakannya pertemuan keempat negara yang dilakukan pada sela-sela pertemuan Forum Regional ASEAN di

Manila.¹⁰ Selain melakukan pertemuan, keempat negara ini juga melaksanakan kegiatan latihan bersama angkatan laut di Teluk Bengala yang dikenal sebagai Latihan Malabar (Malabar 07-02)

Pelaksanaan Quad atau yang saat itu dikenal dengan QSD tidak berlangsung lama karena banyak yang beranggapan akan potensi QSD yang memunculkan organisasi keamanan seperti aliansi formal NATO di Asia. Meningkatnya tekanan dan tuduhan yang diarahkan pada QSD menjadikan Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia membatasi kegiatan QSD tanpa menyentuh ranah keamanan. Pada September 2007, Shinzo Abe melakukan pengunduran diri dari jabatan perdana menteri yang kemudian juga menghilangkan minat QSD untuk dapat berlanjut. Keadaan ini menjadikan QSD berakhir pada tahun 2008 tanpa kejelasan dan kegiatan kelompok negara ini pun berhenti.

Berhentinya *Quadrilateral Security Dialogue* tidak serta merta menghilangkan ide itu sendiri. Shinzo Abe sebagai pelopor ide *Quadrilateral Security Dialogue* yang kembali menjabat sebagai perdana menteri pada tahun 2012 kembali mendorong ide *Quadrilateral Security Dialogue* yang tertuang di dalam tulisannya yang berjudul "*Asia's Democratic Security Diamond*".¹¹ Tulisan tersebut mendorong kembali konsep Quad dan memperkuat kerja sama negara-negara terutama para anggota Quad dalam menjaga kawasan Indo-Pasifik yang cukup rentan terutama pada perairan Laut China Selatan agar tetap bebas, stabil, dan menjaga

¹⁰ Harsh V Pant, "India and the Quad: Chinese Belligerence and India Resilience", Observer Research Foundation, diakses pada 7 Februari 2025, <https://www.orfonline.org/research/india-and-the-quad>

¹¹ Abe Shinzo, "*Asia's Democratic Security Diamond*", Project Syndicate, diakses pada 8 Februari 2025, <https://www.project-syndicate.org/magazine/a-strategic-alliance-for-japan-and-india-by-shinzo-abe>

tatanan berbasis aturan, salah satunya ialah UNCLOS 1982.

Setelah hampir satu dekade, pada akhirnya di bulan November 2017 disela-sela pertemuan KTT ASEAN Manila, para pejabat dari keempat negara tersebut mulai membahas mengenai konsep “Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka” serta permasalahan keamanan maritim lainnya.¹² Pertemuan ini kemudian menjadi awal dari kebangkitan kembali ide-ide Quad yang sebelumnya sempat terhenti dan tahun 2021 merupakan pertemuan puncak pertama Quad yang dilakukan secara virtual. Pertemuan ini juga menghasilkan sebuah *joint statement: Spirit of the Quad* yang berisikan deklarasi bersama keempat negara yang berkomitmen untuk kembali bekerjasama dalam formasi *Quadrilateral Security Dialogue* dengan tujuan utama ialah mendorong Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka serta memprioritaskan hukum internasional dalam domain maritime khususnya yang tercermin dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) dalam menghadapi tantangan terutama dalam kawasan Laut China Selatan.¹³

Dinamika Konflik Laut China Selatan

Kawasan perairan bagi sebuah negara merupakan unsur penting yang harus dijaga keberadaannya. Negara menganggap perairan merupakan sumber kekayaan sebuah negara yang menyimpan banyak sekali potensi sumber daya alam, selain itu

¹² Patrick Gerard Buchan dan Benjamin Rimland, “Defining the Diamond: The Past, Present, and Future of the Quadrilateral Security Dialogue”, CSIS Briefs, diakses pada 8 Februari 2025, <https://www.csis.org/analysis/defining-diamond-past-present-and-future-quadrilateral-security-dialogue>

¹³ Ministry of External Affairs: Government of India, “Quad Leaders’ Joint Statement: The Spirit of the Quad”, diakses pada 10 Februari 2025, https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/33620/Quad_Leaders_Joint_State_ment_The_Spirit_of_the_Quad

juga menjadi salah satu jalur perdagangan yang banyak digunakan oleh negara di dunia untuk melakukan kegiatan perekonomiannya. Salah satu kawasan yang menjadi pusat jalur perdagangan dunia ialah Laut China Selatan dengan perdagangan yang melewati kawasan ini sekitar \$3,4 triliun atau sekitar 21 persen dari perdagangan global pada tahun 2016.¹⁴ Selain menjadi kawasan vital perdagangan, Laut China Selatan juga menyimpan sumber daya alam yang berlimpah baik dari hayati hingga mineral yang tersimpan di kedalaman perairan tersebut.

Memanasnya kawasan Laut China Selatan memiliki beberapa faktor, salah satunya ialah klaim kawasan perairan yang menjadi salah satu faktor utama ketegangan antarnegara. Perselisihan ini bermula sejak tahun 1947 saat China berusaha mengklaim secara sepihak kawasan Laut China Selatan dengan dalih sejarah China *eleven-dash-line* yang kemudian dikenal dengan istilah *nine-dash-line*. Upaya klaim ini dipertegas dengan diproduksi peta klaim China pada tahun 1947 dengan menggunakan sejarah Dinasti Ming yang menunjukkan garis putus-putus yang menandakan teritorial China terhadap kawasan perairan tersebut.

Kemudian, pada tahun 2009 China kembali melakukan “gebrakan” baru dengan menyerahkan peta klaim Laut China Selatan kepada pihak PBB pada Mei 2009 dengan melampirkan peta *nine-dash-line* milik China. Pengedaran peta tersebut dilakukan oleh China dengan tujuan untuk memperlihatkan wilayah kedaulatan perairan yang harusnya dimiliki oleh China mengikuti sejarah milik negara tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh China atas klaim sebagian besar kawasan Laut China

¹⁴ Tim China Power, “How Much Trade Transits the South China Sea?”, China Power, diakses pada 9 April 2025, <https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/>

Selatan yang juga meliputi kawasan yang dipersengketakan yaitu kepulauan Paracel, kepulauan Sparty, Scarborough Shoal, Second Thomas Shoal, bahkan kini juga mengklaim kawasan Laut Natuna Utara sebagai bagian dari klaim *nine-dash-line*.

Pada tahun 2016 keputusan arbitrase dikeluarkan oleh pengadilan dengan menyatakan bahwa klaim yang dilakukan oleh China atas Laut China Selatan tidak sah akibat ketidaksesuaian dengan hukum kelautan yang tertera di UNCLOS 1982 mengenai wilayah kedaulatan perairan, terutama pasal terkait Zona Ekonomi Eksklusif. Namun, keputusan arbitrase ini dianggap tidak sah dan tidak akan diimplementasikan oleh China. Keputusan China ini menunjukkan sikap China yang tidak mematuhi UNCLOS 1982 yang notabene sudah ditandatangani dan diratifikasi oleh China.

Kondisi Laut China Selatan dalam kisaran 2020-2024 menunjukkan gejala eskalasi konflik yang mengkhawatirkan, terutama dengan keterlibatan militer ataupun persenjataan pada kawasan Laut China Selatan, serta kegiatan ilegal yang terus terjadi bahkan mengalami peningkatan pada kawasan ini. Permasalahan ini tidak lagi hanya menjadi pembahasan tingkat regional, namun sudah menjadi salah satu permasalahan urgensi bagi dunia internasional karena dianggap dapat menjadi ancaman bagi stabilitas global, terutama dalam bidang ekonomi dan keamanan.

Pada tahun 2020 disaat dunia sedang disibukkan oleh munculnya Covid-19, situasi Laut China Selatan ternyata mengalami lonjakan. Pada bulan Februari 2020, dilaporkan oleh pihak Angkatan Bersenjata Filipina bahwa China mengarahkan sistem kendali senjata ke kapal angkatan laut Filipina yang berada di Kepulauan Sparty yang secara hukum laut internasional merupakan Zona Ekonomi

Eksklusif Filipina.¹⁵ Pada bulan April 2020 China menenggelamkan kapal nelayan Vietnam di Kepulauan Paracel, tepatnya di kepulauan Hoang Sa dengan cara menabrakkan dan kemudian menenggelamkan kapal Vietnam.¹⁶ Tindakan China ini tentu mendapatkan protes terutama dari Vietnam dan Filipina karena sudah dapat dianggap tindakan agresif yang dapat mengancam nyawa dan merusak property milik negara lain.

Tahun 2021, ketegangan kembali terjadi setelah China melakukan pengesahan terhadap *Coast Guard Law of the People's Republic of China* di bulan Februari 2021.¹⁷ Undang-undang tersebut mengatur mengenai penjagaan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan China pada kawasan perairan dibawah yurisdiksi China dengan mengizinkan penggunaan kekuatan militer China terhadap pelaku pelanggaran kedaulatan perairan yang diklaim oleh China. Penggunaan kekuatan militer inilah yang kemudian menimbulkan protes keras karena dikhawatirkan dapat meningkatkan konflik Laut China Selatan semakin meluas. Selain itu, pada bulan Februari hingga Maret 2021 terlihat setidaknya 200 kapal China yang berlabuh di kawasan Whitsun Reef yang diklaim oleh Filipina bahwa kapal-kapal tersebut berisi milisi China.

¹⁵ Editor Council on Foreign Relations, "China's Maritim Disputes", Council on Foreign Relations, diakses pada 9 April 2025, <https://www.cfr.org/timeline/chinas-maritime-disputes>

¹⁶ Retno Hemawati, "Vietnam Protes Penenggelaman Kapal oleh Tiongkok", Media Indonesia, diakses pada 9 April 2025,

<https://mediaindonesia.com/internasional/301249/vietnam-protes-penenggelaman-kapal-oleh-tiongkok>

¹⁷ Food and Agriculture Organization, "Coast Guard Law of the People's Republic of China", diakses pada 10 April 2025, <https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC200635/>

Selanjutnya, pada tahun 2022 agresivitas China masih berlanjut. Menurut keterangan The Guardian pada tahun 2022 bahwa China telah melakukan militerisasi penuh terhadap tiga pulau dari beberapa pulau reklama yang telah dibangun China sejak 2013. China dilaporkan telah mempersenjatai pulau tersebut dengan sistem antikapal dan antipesawat, peralatan laser, dan jet tempur.¹⁸ Dengan militerisasi yang dilakukan China tentu saja menimbulkan kekhawatiran akan ancaman yang disebabkan oleh peletakan instalasi militer di beberapa lokasi yang disengketakan di Laut China Selatan.

Tahun 2023 tepatnya pada bulan Februari dilaporkan oleh Filipina bahwa China menggunakan alat militer yaitu laser untuk menggagalkan misi pasokan ulang ke beting lebih tepatnya mengarah pada Second Thomas Shoal yang disengketakan di Laut China Selatan.¹⁹ Laser China tersebut dengan sengaja diarahkan kepada para awak kapal penjaga pantai Filipina dengan maksud agar Filipina untuk mundur dan bahkan juga melakukan manuver berbahaya sekitar 150 yard. Tindakan China ini dilakukan dengan dalih bahwa Filipina telah melanggar batasan perairan kedaulatan China, namun apabila dilihat dari jarak Second Thomas Shoal hanya sekitar 105 mil laut sebelah barat Palawan yang artinya masih berada di bawah ZEE Filipina berdasarkan peraturan UNCLOS 1982.

Pada 30 April 2024 China kembali dituduh oleh pihak Filipina telah melakukan penyerangan serta perusakan terhadap dua

kapal di Laut China Selatan tepatnya di Scarborough Shoal.²⁰ Tindakan China ini bukan hanya melanggar hak Filipina atas zona ekonomi eksklusifnya, namun juga telah membahayakan keselamatan para awak kapal Filipina pada kawasan Laut China Selatan yang masih menggunakan *freedom of navigation*.

Strategi *Quadrilateral Security Dialogue* Dalam Menanggapi Eskalasi Konflik Laut China Selatan

Bueger dan Edmunds menawarkan empat framework untuk menjadi patokan penelitian ini yaitu kerangka hukum, kerangka berbasis negara dan institusi, kerangka praktik, dan kerangka penyebab akar. *Quadrilateral Security Dialogue* sebagai kumpulan negara aliansi informal yang berbasis di Indo-Pasifik tentu saja memandang konflik Laut China Selatan sebagai permasalahan yang mendesak. Penelitian ini menggunakan kerangka negara dan kerangka praktik untuk dapat menjelaskan bagaimana respon negara secara kolektif mengenai isu ketegangan di kawasan Laut China Selatan. Bueger dan Edmunds juga memberikan beberapa *toolbox solutions* yang nantinya bisa menjadi acuan untuk melihat inisiatif strategi Quad dalam merespon isu ini. Terdapat tiga inisiatif strategi yang telah dikeluarkan atau dirancang oleh Quad dalam merespon permasalahan di Laut China Selatan yaitu *Malabar Exercise*, *Quad-at-Sea*, dan *Indo-Pasific Partnership Maritime Domain Awareness*.

Malabar Exercise

¹⁸ Tim Associated Press, "China has Fully Militarized Three Islands in South China Sea, US Admiral Says, The Guardian, diakses pada 10 April 2025, <https://www.theguardian.com/world/2022/mar/21/china-has-fully-militarized-three-islands-in-south-china-sea-us-admiral-says>

¹⁹ Joel Guinto, "South China Sea: Philippines says China used 'military-grade' laser against boat", BBC, diakses pada 11 April 2025, <https://www.bbc.com/news/world-asia-64621414>

²⁰ Editor Reuters, "Philippines accuses China of damaging its vessels in dispute South China Sea Shoal", Reuters, diakses pada 11 April 2025, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinas-coast-guard-expels-philippine-vessels-scarborough-shoal-state-media-says-2024-04-30/>

Malabar Exercise atau latihan Malabar adalah latihan gabungan militer yang dilakukan oleh para anggota Quad. Latihan ini awalnya merupakan bentuk kerja sama antara India dan Amerika Serikat yang sudah dilakukan sejak tahun 1992.²¹ Latihan ini kemudian diperluas pada tahun 2007 sebagai bentuk latihan keempat negara Quad. Berhentinya kegiatan Quad juga memberhentikan latihan Malabar antar empat negara pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2015 Jepang resmi kembali ikut serta dalam latihan Malabar yang kemudian disusul oleh Australia pada tahun 2020 yang juga menjadi permulaan latihan Malabar dilaksanakan dengan formasi lengkap para anggota Quad.

Tujuan dari pelaksanaan latihan bersama Malabar ini ialah untuk dapat membentuk kerja sama yang semakin erat antara keempat negara dan mempromosikan juga menekankan pada Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Latihan Malabar akan dilaksanakan sebanyak 2 fase setiap tahunnya yaitu fase pelabuhan dan fase laut. Namun, pada tahun 2020-2022 pelaksanaan latihan Malabar hanya dilakukan di fase laut saja. Hal tersebut disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga keempat negara menerapkan “*no-contact, at sea only*”.

Tahun 2020 latihan dilaksanakan sebanyak dua kali dengan hanya melakukan fase laut yaitu pada tanggal 3-6 di lepas pantai Visakhapatnam, Teluk Bengala. Kemudian disusul pada tanggal 17-20 November 2020 di Laut Arab. Latihan Malabar pada tahun 2020 ini menjadikan India sebagai tuan rumah pelaksana dengan

²¹ Press Information Bureau Delhi, “Malabar Naval Exercise”, Press Information Bureau Government of India Ministry of Defence, diakses pada 13 Mei 2025, <https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1696140>

menerapkan “*no-contact, at sea only*”.²² Latihan Malabar pada tahun 2021 kembali hanya dilaksanakan pada fase laut dengan Amerika Serikat sebagai penyelenggara. Latihan dilaksanakan pada tanggal 26-29 Agustus 2021 di Laut Filipina dan tanggal 12-15 Oktober 2021 di Teluk Bengala.²³ Kemudian, pada tahun 2022 latihan Malabar kembali dilaksanakan pada tanggal 8-15 November di perairan lepas pantai Jepang dengan Jepang yang akan bertindak sebagai tuan rumah pelaksana.²⁴ Tahun 2023, latihan Malabar ini menjadikan Australia sebagai tuan rumah pelaksana. Latihan ini dilaksanakan dengan dua fase yaitu fase pelabuhan pada 11-15 Agustus 2023 di pelabuhan Sydney dan kemudian fase laut yang dilaksanakan pada 16-21 Agustus 2023 di lepas pantai Sydney.²⁵ Selanjutnya, latihan pada tahun 2024 menjadikan India kembali mengambil peran sebagai tuan rumah. Latihan ini dilaksanakan dua fase yaitu fase pelabuhan yang dilaksanakan pada 8-12 Oktober 2024 di pelabuhan Visakhapatnam dan fase laut dari 13-18 Oktober 2024 di Teluk Bengala.²⁶ Agenda

²² Kementerian Pertahanan India, “MALABAR-20”, Press Information Bureau, diakses pada 28 Mei 2025, <https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1669481>

²³ Maritime Staff Office, “MALABAR 2021 (Update)”, Japan Maritime Self-Defense Force, diakses pada 28 Mei 2025, <https://www.mod.go.jp/msdf/en/release/202110/20211011.pdf>

²⁴ Defense Media Activity, “Japan hosts Australia, India, U.S. in Naval Exercise Malabar 2022”, Navy.mil, diakses pada 29 Mei 2025, <https://www.navy.mil/Press-Office/News-Stories/Article/3216935/japan-hosts-australia-india-us-in-naval-exercise-malabar-2022/>

²⁵ Kementerian Pertahanan India, “Exercise Malabar - 23 Concludes”, Press Information Bureau, diakses pada 29 Mei 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1950870>

²⁶ Kementerian Pertahanan India, “Maritime Exercise Malabar 2024, Commencing at Visakhapatnam on 08 Oct Hosted by India, USA,

latihan Malabar setiap tahunnya tidak pernah berubah yakni mencakup operasi anti-permukaan, operasi latihan anti-udara, operasi anti-kapal selam, hingga latihan penembakan senjata dan latihan taktis lainnya.

Tujuan pelaksanaan latihan Malabar ini tidak hanya untuk memperkuat kerja sama angkatan laut dan meningkatkan interoperabilitas, namun juga berupaya meningkatkan keamanan maritim dan menunjukkan komitmen kolektif negara anggota dalam menjaga tatanan maritim dari upaya-upaya ilegal dan tindakan sepihak yang dapat mengganggu tatanan maritim.²⁷ Jadi, latihan Malabar ini seolah memberikan sinyal deterrence kepada pihak China untuk tidak bertindak mendominasi atau terlalu jauh di kawasan Indo-Pasifik, terutama upaya klaim sepihak China di Laut China Selatan. Keempat negara tersebut berkomitmen dalam menjaga kawasan Indo-Pasifik dan menunjukkan solidaritas serta kemampuan operasi gabungan dalam menghadapi potensi ancaman kawasan di masa depan demi memastikan stabilitas regional kawasan ini. Hal ini dapat dilihat dari latihan Malabar yang sudah beberapa kali melaksanakan pelatihan di lokasi yang cukup dekat dengan kawasan sengketa tersebut yaitu Laut Filipina. Selain itu, juga dapat dilihat dari reaksi China yaitu dengan tetap memberikan izin jenis latihan seperti

ini namun dilarang melakukannya pada kawasan perairan Laut China Selatan.²⁸

Quad-at-Sea Observer Ship Mission

Bueger dan Edmunds dalam bukunya yaitu *Understanding Maritime Security* memberikan beberapa *toolbox* sebagai solusi yang dapat dipilih oleh negara ataupun kelompok negara dalam upaya menekan ancaman keamanan maritim yakni salah satunya ialah *Operations at Sea* yaitu aktivitas yang dikoordinasikan langsung oleh negara ataupun organisasi untuk dapat mengawasi lautan dan mencegah kejahatan atau ancaman.²⁹ Bentuk dari *Operation at Sea* ialah patroli yang biasanya dilakukan oleh negara baik secara sendiri ataupun kolektif terhadap kawasan kedaulatannya.

Pada tahun 2024, Quad di dalam *Joint Statement* nya mengumumkan inisiatif baru yaitu *Quad-at-Sea Ship Observer Mission* sebagai bentuk respon terhadap isu-isu yang terjadi beberapa tahun belakangan ini di Indo-Pasifik terutama Laut China Selatan yang terus mengalami insiden pemicu konflik kawasan di perairan tersebut.³⁰ *Quad at Sea* merupakan kegiatan yang berbeda dengan latihan Malabar. Apabila latihan Malabar merupakan latihan kemiliteran yang akan melibatkan unit angkatan militer, maka *Quad at Sea* adalah patroli penjaga pantai yang akan melibatkan perwakilan penjaga pantai dari keempat negara untuk bersama-sama berpatroli

Australia and Japan in Participation”, Press Information Bureau, diakses pada 29 Mei 2025, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2062316>

²⁷ Sayantan Halder, “Malabar Exercise: Strengthening Synergy Among Quad Nations”, Observer Research Foundation, diakses pada 14 Mei 2025, <https://www.orfonline.org/expert-speak/malabar-exercise-strengthening-synergy-among-quad-nations?>

²⁸ Łukasz Kobierski, “Malabar Exercise, “Asian NATO” and Beijing’s Response”, Warsaw Institute, diakses pada 14 Mei 2025,

<https://warsawinstitute.org/malabar-exercise-asian-nato-beijings-response/>

²⁹ Christian Bueger dan Timothy Edmunds, “Understanding Maritime Security”, (New York: Oxford University Press, 2024)

³⁰ Kementerian Luar Negeri Jepang, “The Wilmington Declaration: Joint Statement from the Leaders of Australia, India, Japan, and the United States”, diakses pada 14 Mei 2025, <https://www.mofa.go.jp/files/100728100.pdf>

menjaga kawasan perairan di Indo-Pasifik terutama kawasan titik panas di Indo-Pasifik. Penjagaan pantai oleh Quad ini diharapkan dapat terlaksana mulai dari tahun 2025 dan secara terbuka diharapkan dapat melibatkan negara lain untuk bekerja sama dalam melindungi kawasan ini.

Misi penjagaan pantai *Quad-at-Sea* akan melibatkan personel penjaga pantai US Coast Guard, Japan Coast Guard, Australian Border Force, dan India Coast Guard. Lokasi spesifik dari pelaksanaan operasi *Quad-at-Sea* belum diumumkan secara terbuka, namun beberapa ahli mengatakan bahwa kemungkinannya pelaksanaan akan dimulai di kawasan Laut China Selatan dan Laut China Timur sebagai kawasan dengan tingkat aktivitas ilegal yang cukup masif.³¹ *Quadrilateral Security Dialogue* dalam pelaksanaan *Quad at Sea* juga sangat terbuka dan mengharapkan atas kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam upaya memperlancar inisiatif *Quad at Sea* pada kawasan Laut China Selatan. Kerja sama penjaga pantai melalui *Quad at Sea* dapat meningkatkan kerangka kerja “Quad Plus” yaitu kerangka kerja Quad yang melibatkan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik. Sehingga, adanya *Quad at Sea* akan membuka jalan kerja sama antara penjaga pantai Quad yang diikuti oleh negara-negara seperti Vietnam, Filipina, dan Indonesia dalam upaya menghadapi tantangan dan menjaga kawasan dari potensi ancaman kawasan terutama China di kawasan maritim.

Indo-Pacific Partnership Maritime Domain Awareness

³¹ Gabriel Dominguez dan Jesse Johnson, “ ‘Quad’ cements ties with coast guard patrols amid China Concerns “, *The Japan Times*, diakses pada 23 Mei 2025, <https://www.japantimes.co.jp/news/2024/09/22/asia-pacific/politics/quad-summit-biden-kishida-china/>

Bueger dan Edmunds dalam bukunya yang berjudul *Understanding Maritime Security* menyediakan beberapa *toolbox solutions* dalam upaya penyelesaian masalah keamanan maritim ini, salah satunya ialah penerapan *Maritime Domain Awareness (MDA)*.³² *Maritime Domain Awareness* merupakan usaha kolektif yang dilakukan oleh negara ataupun aktor non negara dalam memahami aktivitas laut secara menyeluruh guna menjaga keamanan. Upaya MDA ini memerlukan beberapa hal penting seperti teknologi yang mumpuni, memerlukan kerja sama dan pertukaran informasi yang jelas dan kuat karena laut merupakan kawasan yang luas dan sulit untuk lebih sulit untuk diamati maupun diawasi.

Tahun 2022, Quad mengeluarkan sebuah *joint statement* dengan salah satu berisi pengumuman mengenai pelaksanaan *Indo-Pacific Partnership Maritime Security Dialogue (IPMDA)*. IPMDA dirancang untuk bekerjasama dengan mitra regional dalam menanggapi bencana kemanusiaan maupun alam dan memerangi penangkapan ikan ilegal. Pelaksanaan inisiatif ini akan menggunakan layanan pelacakan berbasis satelit yang memungkinkan dapat mendeteksi kegiatan ilegal yang terjadi pada kawasan maritim, termasuk melacak kapal yang dengan sengaja mematikan *Automatic Identification System (AIS)* ketika kapal sedang beroperasi.

Dalam pelaksanaannya, Quad memutuskan menggunakan HawkEye 360 sebagai sumber data satelit yang akan digunakan dalam pelaksanaan IPMDA. HawkEye 360 merupakan perusahaan yang berpusat di Herndon, Virginia yang mengkhususkan diri dalam pengumpulan dan analisis data dengan menggunakan frekuensi radio (RF) yang dapat terpancar

³² Christian Bueger dan Timothy Edmunds, “*Understanding Maritime Security*”, (New York: Oxford University Press, 2024)

melalui kapal, radar, atau perangkat komunikasi lainnya.³³ Jadi, meskipun AIS pada kapal dinonaktifkan, HawkEye 360 tetap dapat mendeteksi kapal dengan menggunakan data RF yang akan menangkap sinyal radio seperti radio komunikasi, radar navigasi kapal, atau perangkat sonar.

HawkEye 360 sebagai penyedia data informasi dari inisiatif IPMDA ini akan mengumpulkan data real-time pada kawasan. Informasi yang terkumpul kemudian akan dikumpulkan ke *Information Fusion Center* (IFC) yang tersebar di beberapa titik, salah satunya di Singapura sebagai IFC di kawasan Asia Tenggara untuk kemudian data tersebut dianalisis dan diolah dengan menggabungkan data AIS dan radar yang kemudian dibagikan kepada negara-negara kawasan yang bermitra.³⁴ IFC yang berada di beberapa titik ini berguna sebagai pusat penyebaran informasi bagi negara-negara dalam meningkatkan dan mendukung keamanan maritim dengan memanfaatkan data dan analitik dari HawkEye 360 dengan menyebarkannya kepada negara-negara kawasan.

Pada tahun 2022 di Konferensi Tahunan Laut China Selatan, Ely Ratner, Sekretaris Menteri Pertahanan Amerika Serikat menyatakan bahwa IPMDA merupakan cara bagi Quad dalam membantu negara-negara dalam menjaga kawasan maritimnya dan Laut China Selatan merupakan bagian penting dalam

pelaksanaan inisiatif ini.³⁵ Keseriusan pelaksanaan inisiatif ini dapat terlihat dari didemonstrasikannya IPMDA dalam latihan *Southeast Asia Cooperation and Training* (SEACAT) yaitu latihan rutin yang dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara dalam upaya menjalin kerja sama yang lebih baik. Pelatihan IPMDA dalam SEACAT merupakan bentuk keseriusan Quad dalam merespon dan membantu negara yang terdampak dalam ketegangan konflik perairan Laut China Selatan.

Gambar 2. Contoh Hasil Data HawkEye 360 di Whitsun Reef Tahun 2021



Sumber: HawkEye 360

Gambar diatas menunjukkan contoh hasil data HawkEye 360 yang mendeteksi *Digital Selective Calling VHF* palsu yang tidak terkait dengan kapal apapun berdasarkan data VHF yang sudah terdata dan dicurigai merupakan kapal milik China yang ditambatkan di Whitsun Reef pada tahun 2021.³⁶ Data tersebut dapat disimpulkan bahwa kapal-kapal China

³³ Editor HawkEye 360, “Enhance Maritime Domain Awareness with RF Data and Analytics”, HawkEye 360, diakses pada 14 Mei 2025, <https://www.he360.com/solutions/maritime-domain-awareness/>

³⁴ Ariel Stenek, “A Principled Approach to Maritime Domain Awareness in the Indo-Pacific”, Pacific Forum, diakses pada 29 Mei 2025, <https://pacforum.org/publications/pacnet-28-a-principled-approach-to-maritime-domain-awareness-in-the-indo-pacific/>

³⁵ Editor Center for Strategic and International Studies, “Twelfth Annual South China Sea Conference: Lunch Keynote”, Center for Strategic and International Studies, diakses pada 23 Mei 2025, <https://www.csis.org/analysis/twelfth-annual-south-china-sea-conference-lunch-keynote>

³⁶ Editor HawkEye 360, “Providing Greater Transparency in the South China Sea”, HawkEye 360, diakses pada 23 Mei 2025, <https://www.he360.com/resource/providing-greater-transparency-in-the-south-china-sea/>

melakukan tindakan ilegal dan berusaha menghindari pelacakan terhadap kapal dengan menggunakan identifikasi palsu dalam berkomunikasi antara satu sama lain. Pada Februari hingga Maret 2021 China memang menambatkan 220 kapal China di Whitsun Reef yang merupakan bagian dari Kepulauan Spratly selanjutnya dikenal dengan Insiden Whitsun Reef.

KESIMPULAN

Laut China Selatan merupakan salah satu kawasan yang hampir selalu mengalami ketegangan. Ketegangan ini biasanya diakibatkan oleh beberapa faktor seperti klaim sepihak yang dilakukan sebuah negara terhadap kawasannya hingga melakukan kegiatan ilegal di kawasan yang tidak termasuk pada kawasan kedaulatannya yang disesuaikan dengan peraturan yang tertera di dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

Quadrilateral Security Dialogue yang berbasis di Indo-Pasifik tentu merasakan kekhawatiran akan eskalasi konflik Laut China Selatan sehingga merasa perlu memberikan respon terkait fenomena yang terjadi di Laut China Selatan berupa inisiatif strategi yang dapat membantu negara kawasan menjaga Laut China Selatan dari potensi ancaman yang lebih luas. Strategi *Quadrilateral Security Dialogue* yang menysasar kepada keamanan maritim saat ini hanya tiga yaitu latihan Malabar, *Quad at Sea*, dan *Indo-Pasifik Maritime Domain Awareness*. Strategi yang dirancang oleh *Quadrilateral Security Dialogue* ini diharapkan bisa memberikan bantuan yang signifikan dan jangka panjang dalam mencegah potensi ancaman keamanan maritim yang berkepanjangan atau lebih meluas di Laut China Selatan.

Namun dalam pelaksanaan strategi ini membutuhkan proses dan tantangan tersendiri. *Quadrilateral Security Dialogue* tidak dapat terlalu turut campur dalam

perselisihan di Laut China Selatan dikarenakan sikap skeptis negara Asia Tenggara. Selain itu, aliansi yang bersifat informal juga menjadi pengaruh terhambatnya *Quadrilateral Security Dialogue* untuk dapat lebih memberikan perannya di kawasan. Hal tersebut dikarenakan setiap negara memiliki kepentingannya tersendiri dan tanpa perjanjian yang mengikat, kerja sama para anggota *Quadrilateral Security Dialogue* akan bersifat fleksibel dan tidak mengikat sehingga tidak akan efektif dalam pelaksanaan kerja sama.

Melihat kondisi ini maka *Quadrilateral Security Dialogue* hanya dapat memberikan bantuan tanpa menjadi pihak yang mendominasi. Hal ini dikarenakan kekhawatiran akan kemungkinan eskalasi konflik yang semakin besar pada kawasan. Selain itu, para anggota *Quadrilateral Security Dialogue* juga menghargai keberadaan sentralitas ASEAN agar tidak terjadi pergeseran diskursus keamanan. Oleh karena itu, *Quadrilateral Security Dialogue* tidak akan menjadi aktor utama yang mendominasi dalam kawasan Laut China Selatan dan hingga saat ini hanya berperan sebagai pendukung dalam membantu negara Asia Tenggara ataupun negara terdampak lainnya dalam menghadapi isu kawasan dengan strategi-strategi yang ditawarkan oleh *Quadrilateral Security Dialogue* dalam merespon ketegangan kawasan Laut China Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, A., Putra, A. P., Aryadi, A. W., Nabila, N., Ramli, N., Najwa, A., & Sutriani, S. (2023). Pesona Kekayaan Alam: Sumber Konflik di Kawasan Laut China Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 240–246.
- Associated Press. (2022, Maret 21). *China has fully militarized three islands in South China Sea, US admiral says*. The

- Guardian.
<https://www.theguardian.com/world/2022/mar/21/china-has-fully-militarized-three-islands-in-south-china-sea-us-admiral-says>
- Buchan, P. G., & Rimland, B. (2020, Maret 16). *Defining the Diamond: The Past, Present, and Future of the Quadrilateral Security Dialogue*. Center for Strategic & International Studies.
<https://www.csis.org/analysis/defining-diamond-past-present-and-future-quadrilateral-security-dialogue>
- Bueger, Christian; Edmunds, Timothy. (2024). *Understanding Maritime Security*. Oxford University Press.
- Coast Guard Law of the People's Republic of China*. (2021). Food and Agriculture Organization of the United Nations.
<https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC200635/>
- China's Maritime Disputes*. (n.d.). Council on Foreign Relations. Diambil 5 Juni 2025,
<https://www.cfr.org/timeline/chinas-maritime-disputes>
- De Castro, R. C. (2020). The Limits of Intergovernmentalism: The Philippines' Changing Strategy in the South China Sea Dispute and Its Impact on the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(3).
- Defense Media Activity. (2022, November 11). *Japan hosts Australia, India, U.S. in Naval Exercise Malabar 2022*. Navy.mil. <https://www.navy.mil/Press-Office/News-Stories/Article/3216935/japan-hosts-australia-india-us-in-naval-exercise-malabar-2022/>
- Dominguez, G., & Johnson, J. (2024, September 22). "Quad" cements ties with coast guard patrols amid China concerns. The Japan Times.
<https://www.japantimes.co.jp/news/2024/09/22/asia-pacific/politics/quad-summit-biden-kishida-china/>
- Enhance Maritime Domain Awareness with RF Data and Analytics*. (n.d.). HawkEye 360. Diambil 5 Juni 2025, dari
<https://www.he360.com/solutions/maritime-domain-awareness/>
- Ghosh, S. (2024, Februari 17). *11 Dash Line - The Geopolitical Lines of Conflict in the South China Sea*. The Geostrata.
<https://www.thegeostrata.com/post/11-dash-line-the-geopolitical-lines-of-conflict-in-the-south-china-sea>
- Guinto, J. (2023, Februari 13). *South China Sea: Philippines says China used "military-grade" laser against boat*. BBC.
<https://www.bbc.com/news/world-asia-64621414>
- Haldar, S. (2024, Oktober 23). *Malabar Exercise: Strengthening synergy among Quad nations*. Observer Research Foundation.
<https://www.orfonline.org/expert-speak/malabar-exercise-strengthening-synergy-among-quad-nations?>
- Hemawati, R. (2020, April 4). *Vietnam Protes Penenggelaman Kapal oleh Tiongkok*. Media Indonesia.
<https://mediaindonesia.com/internasional/301249/vietnam-protes-penenggelaman-kapal-oleh-tiongkok>
- How Much Trade Transits the South China Sea?* (n.d.). ChinaPower Project. Diambil 5 Juni 2025, dari
<https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/>
- Kementerian Luar Negeri India. (2021, Maret 12). *Quad Leaders' Joint Statement: "The Spirit of the Quad."* Ministry of External Affairs Government of India.
https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/33620/Quad_Leade

- rs_Joint_Statement_The_Spirit_of_the_Quad
- Kementerian Luar Negeri Jepang. (n.d.). *The Wilmington Declaration: Joint Statement from the Leaders of Australia, India, Japan, and the United States*. Ministry of Foreign Affairs of Japan. Diambil 5 Juni 2025, dari <https://www.mofa.go.jp/files/100728100.pdf>
- Kobierski, Ł. (2020, November 6). *Malabar Exercise, "Asian NATO" and Beijing's Response*. Warsaw Institute. <https://warsawinstitute.org/malabar-exercise-asian-nato-beijings-response/>
- Maritime Staff Office. (2021, Oktober 11). *MALABAR 2021 (Update)*. Japan Maritime Self-Defense Force. <https://www.mod.go.jp/msdf/en/release/202110/20211011.pdf>
- Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Nainggolan, P. P. (2018). MILITERISASI LAUT CHINA SELATAN. *Jurnal Info Singkat*, 10(11).
- Philippines accuses China of damaging its vessels in disputed South China Sea shoal*. (2024, April 20). Reuters. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinas-coast-guard-expels-philippine-vessels-scarborough-shoal-state-media-says-2024-04-30/>
- Pratama, Tide Aji; Ilyas, Mochamad; Ramadhani, Masyithoh Annisa; Yahya, Isep Parid; Trisulo, Keanu Arief Triputra Ramadhana; Listya, Anindita Kusuma; Pادمi, Made Fitri Maya; Anggoro, H. A. (2024). *Diplomasi Parlemen di Tengah Gejolak Dunia Peran BKSAP DPR RI di Kancah Parlemen Dunia*. Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Press Information Bureau Delhi. (2020, Desember 2). *MALABAR-20*. Press Information Bureau Government of India Ministry of Defence. <https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1669481>
- Press Information Bureau Delhi. (2021, Februari 8). *Malabar Naval Exercises*. Press Information Bureau Government of India Ministry of Defence. <https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1696140>
- Press Information Bureau Delhi. (2023, Agustus 21). *EXERCISE MALABAR - 23 CONCLUDES*. Press Information Bureau Government of India Ministry of Defence. <https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1950870>
- Press Information Bureau Delhi. (2024, Oktober 5). *Maritime Exercise Malabar 2024, Commencing at Visakhapatnam on 08 Oct Hosted by India, USA, Australia, and Japan in Participation*. Press Information Bureau Government of India Ministry of Defence. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2062316>
- Providing Greater Transparency in the South China Sea*. (n.d.). HawkEye 360. Diambil 5 Juni 2025, dari <https://www.he360.com/resource/providing-greater-transparency-in-the-south-china-sea/>
- Putra, T. S. I., Samekto, F. . A., & Soekotjo, H. (2016). REKLAMASI PULAU REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK DI LAUT CINA SELATAN: SUATU ANALISIS TERHADAP STATUS PENAMBAHAN WILAYAH DAN DAMPAK TERHADAP JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1–14. <https://doi.org/10.14710/DLJ.2016.11221>
- Shinzo, A. (2012, Desember 27). *Asia's Democratic Security Diamond*. Project Syndicate. <https://www.project-syndicate.org/view/full-version/?article=shinzo-12-27-12>

syndicate.org/magazine/a-strategic-alliance-for-japan-and-india-by-shinzo-abe

Stenek, A. (2023, April 4). *A principled approach to maritime domain awareness in the Indo-Pacific*. Pacific Forum.

<https://pacforum.org/publications/pact-28-a-principled-approach-to-maritime-domain-awareness-in-the-indo-pacific/>

Twelfth Annual South China Sea Conference: Lunch Keynote. (2022, Juli 26). Center for Strategic & International Studies.

<https://www.csis.org/analysis/twelfth-annual-south-china-sea-conference-lunch-keynote>